

**STUDI EVALUASI PROGRAM GARDA AMPUH
PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A,B,C
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

Zaki Al Mubarak,
zaki@iainbrahimy.ac.id

Abstract

This study is an evaluation study of the Garda Ampuh Program equal education package A, B, C in Banyuwangi. This program is a non-formal education program imposed by the Government of Banyuwangi in an attempt to run education services to people who have children out of school because of limited funds. This research is a qualitative descriptive field. Outline the implementation of the program of educational equality Powerful Guard Package A, Package B, and Package C runs properly, effectively and efficiently. This is evidenced by the large number of students who join the program are powerful Guard education equality Package A, Package B, and c. it is also supported by data Guard program Powerful learners education equality Package A, Package B, and C the national education examination equality (UNPK).

Keywords: *educational equality, garda ampuh program, educational package A, B, C*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). Konsep pendidikan terpilah menjadi tiga jalur pendidikan yaitu, jalur informal, jalur formal, dan jalur nonformal, UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 10 dalam hal yang sama menerangkan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pendidikan formal dengan berbagai inovasi layanannya terkadang belum cukup ampuh dalam menyediakan pelayanan pendidikan secara menyeluruh. Sebagai alternatif pendidikan nonformal harus didorong untuk bisa melayani masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani. Pendidikan nonformal dapat menjadi jawaban atas keinginan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilannya sebagai bekal untuk dapat hidup lebih layak dimiliki oleh setiap manusia. Tuntutan akan pemenuhan hak dasar manusia tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena disadari, hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi ini. Namun kenyataan yang terdapat di Indonesia sekarang ini angka putus sekolah masih tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya tingginya biaya

pendidikan dan keterbatasan ekonomi orangtua. Tingginya angka putus sekolah di Indonesia didukung oleh pemaparan dari Mendikbud melalui kompasiana.com yang menyatakan bahwa:

"Pada tahun 2007, dari 100 persen anak-anak yang masuk SD, yang melanjutkan sekolah hingga lulus hanya 80 persennya, sedangkan 20 persen lainnya harus putus sekolah. Dari 80 persen siswa SD yang lulus sekolah, hanya 61 persennya yang melanjutkan sekolah ke jenjang SMP sekolah yang setingkat lainnya. Kemudian setelah itu hanya 48 persen yang akhirnya lulus sekolah. Sementara itu, 48 persen yang lulus dari jenjang SMP hanya 21 persennya saja yang melanjutkan ke jenjang SMA. Sedangkan yang bisa lulus jenjang SMA hanya sekitar 10 persen. Persentase ini menurun drastis dimana jumlah anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tinggal 1,4 persen saja". (<http://edukasi.kompasiana.com>).

Antara pendidikan formal dan nonformal, menurut Simkins (1976) dalam Kamil (2011:18), menganalisis perbedaan pendidikan nonformal dan formal secara kontras berdasar pada beberapa terminology, diantaranya: tujuan program, waktu, sistem pembelajaran yang digunakan, dan kontrol (system monitoring dan evaluasi). Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam upaya memajukan pendidikan setiap warga negara diwajibkan untuk mendapatkan pendidikan setidaknya pendidikan dasar, disamping dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan dan menjamin pemerataan pendidikan bagi semua anggota masyarakat pada jenjang pendidikan menengah melalui jalur nonformal telah dikembangkan program pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Program pendidikan kesetaraan paket A, B, C berfungsi sebagai pelayanan kegiatan pembelajaran bagi masyarakat yang ingin memperoleh pengakuan pendidikan setara dengan sekolah formal (paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA) melalui jalur nonformal.

Keberadaan pendidikan kesetaraan adalah termasuk dalam pendidikan nonformal, di mana pendidikan kesetaraan dapat berupa program kelompok belajar paket A yang setara dengan SD/MI, program kelompok belajar paket B yang setara dengan SMP/MTs, serta program kelompok belajar paket C yang setara dengan SMA/MA. Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B, C memerlukan keterlibatan warga masyarakat didalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan paket A, B, C yang ditujukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut.

Berbicara tentang *philosophy* dan teori pendidikan nonformal, tidak terlepas dari pemahaman dan konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi ditengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah *learning society*. Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) sebagai wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat mendorong terbukanya kesempatan menuntut setiap orang masyarakat, organisasi, institusi sosial untuk belajar lebih luas (Kamil, 2011: 23).

Seiring perkembangan zaman permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan nonformal terutama dalam pendidikan kesetaraan paket A, B, C, mulai dari peserta didiknya yang kurang antusias serta biaya, pendidik, dan sarana prasarana yang kurang memadai. Maka dari itu peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendidikan nonformal program pendidikan kesetaraan paket A, B, C dapat dilihat dari daya dukung terhadap implementasi dan pengelolaan program, serta pengembangan program dimasa depan.

Jika dikaitkan dengan hal tersebut di Kabupaten Banyuwangi sendiri memiliki berbagai potensi yaitu bidang pertanian, pariwisata, perkebunan, perikanan, peternakan dan lain sebagainya. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya adalah dari latar belakang pendidikan. Pada tahun 2010 Banyuwangi merupakan salah satu daerah dengan tingkat melek huruf paling rendah di Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat 29 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Bahkan peringkat lama belajar warga Kabupaten Banyuwangi jauh lebih buruk yakni, peringkat 32 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Ketidaktahuan masyarakat atau kurang pahamnya masyarakat terhadap pendidikan non-formal merupakan salah satu penghambat dalam kemajuan pendidikan khususnya pendidikan di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Secara umum masyarakat awam keseluruhan belum sepenuhnya mengetahui pendidikan non-formal termasuk program didalamnya seperti pendidikan kesetaraan paket A, B, C, masyarakat mengetahui istilah kelompok belajar atau kejar paket namun mereka tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari penyelenggaraan program kelompok belajar atau kejar paket yang ada di PKBM-PKBM di Kabupaten Banyuwangi.

Wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan daerah pertanian sehingga banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Seluruh anggota keluarga ikut berperan aktif dalam mengerjakan pekerjaan di sawah baik laki-laki maupun perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mereka rela untuk meninggalkan pendidikan atau karena iming-iming pekerjaan di kota atau luar negeri. Kerena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga tidak bisa mengikuti pendidikan formal yang menurut mereka biaya yang mahal dan tidak ada waktu untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun dengan hal tersebut tidak menjadi alasan anak usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan karena mereka masih bisa merasakan pendidikan yang murah dan waktu yang tidak terikat, yaitu melalui pendidikan nonformal.

Pada tahun 2014 Bupati Banyuwangi telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (Gempita-Perpus) Kabupaten Banyuwangi. Awalnya program Gempita-Perpus hanya focus pada masalah pengentasan buta aksara di Kabupaten Banyuwangi yang angkanya ketika itu tergolong tinggi. Program Gempita-Perpus berhasil mengentaskan puluhan ribu warga buta aksara di seluruh Banyuwangi. Setelah tuntas buta aksara maka peserta didik wajib untuk mengikuti program kesetaraan agar tidak kembali menjadi buta aksara.

Gempita-Perpus pada tahun 2016 bertransformasi menjadi Garda Ampuh (Gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah). Dalam Garda Ampuh ada pengelompokan yang disesuaikan dengan usianya. Usia 6-21 tahun/usia sekolah formal, maka wajib kembali ke sekolah formal. Dan sekolah formal yang menerima anak putus sekolah/DO tidak boleh memungut biaya serupiahpun. Usia diatas 21 tahun diarahkan menjadi peserta didik pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan kelompok belajar (Pokjar) yang menyelenggarakan program kesetaraan paket A, B, C.

Melalui program Garda Ampuh ribuan siswa DO (*dropout*) dapat kembali bersekolah baik di formal maupun di program pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Akan tetapi jumlah yang mengikuti program Garda Ampuh lebih dominan peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A,B, C. Animo massyakarata yang besar terhadap Garda Ampuh Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C mendorong penulisan dan anggota peneliti, untuk meneliti sejauh mana motivasi peserta didik mengikuti program Garda Ampuh Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menjelaskan secara jelas dan rinci informasi atau data yang diperoleh dalam penelitiannya secara mendalam.

Alasan menggunakan metode ini, peneliti berusaha mencari fakta data kemudian mendeskripsikan mengenai pelaksanaan program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Sifat deskriptif kualitatif ini mengarah pada pendeskripsian, penguraian, dan penggambaran kedalam uraian dan pemahaman tentang profil pelaksanaan program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan paket A, B, C, motivasi peserta didik Garda Ampuh pendidikan kesetaraan paket A, B, C, dan faktor faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan paket A, B, C di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh dan dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Metode pengumpulan data yang dilakukan berupa wawancara, observasi, foto, dan dokumen resmi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Program Garda Ampuh

1. Latar Belakang Program

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Banyuwangi masih terdapat penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas pada tahun 2013 tercatat angka sebesar 47.335 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar mereka tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh tani, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau pengangguran. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (GEMPITA-PERPUS).

Dengan Peraturan Bupati itu, diharapkan semua warga masyarakat dan stakeholder, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan perangkatnya, serta Kepala UPTD Pendidikan, Pengawas TK/SD dan Penilik berpartisipasi aktif untuk mewujudkan Banyuwangi bebas dari buta aksara.

Dengan banyaknya masyarakat yang sudah terentaskan dari buta aksara maka tahapan selanjutnya adalah memberikan pelayanan pendidikan, untuk usia sekolah dianjurkan ke sekolah formal. Sedangkan yang melebihi usia sekolah akan dilayani dengan pendidikan kesetaraan Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA/SMK, sehingga IPM Kab. Banyuwangi bisa lebih baik.

2. Dasar Hukum Program

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- e) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNPPWB/PBA);
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 258/E/MS/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Program Pendidikan Keaksaraan;

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).
- j) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Program Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa dan Pengangkatan Murid Putus Sekolah (GEMPITA-PERPUS) Kabupaten Banyuwangi.

3. Tujuan Program

- a) Memberikan pelayanan pendidikan khusus kepada anak muda putus sekolah;
- b) Memperluas akses layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;
- c) Memberikan pelayanan pendidikan lanjutan pasca bebas buta aksara;
- d) Meningkatkan IPM Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menghadapi persaingan global.

4. Sasaran Program

- a) Anak putus sekolah usia sekolah;
- b) Anak muda putus sekolah usia produktif (Prioritas usia 6 sd. 21 tahun);
- c) Alumni program keaksaraan dasar (KD) dan keaksaraan usaha mandiri (KUM) termasuk GEMPITA-PERPUS;
- d) Anak kurang mampu, yatim, fakir miskin putus sekolah;
- e) Anak berkebutuhan khusus;
- f) Masyarakat umum yang belum mengenyam pendidikan dasar dan menengah.

5. Penyelenggara Program

- a) Sekolah Formal (SD/SMP/SMA/SMK);
- b) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C;
- c) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk penguatan kompetensi peserta didik melalui program Pendidikan Kecakapan Keluarga (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW);
- d) Kelompok Belajar (Pokjar) yang berafiliasi dengan PKBM yang diselenggarakan di desa-desa *Smart Kampung*.

6. Pendanaan Program

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui bantuan operasional penyelenggaraan (BOP);
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui bantuan pendampingan;
- c) Kartu Indonesia Pintar/Program Indonesia Pintar (KIP/PIP);
- d) Dana Desa (DD);
- e) *Corporate social responsibility* (CSR) dari BUMN/BUMD dan perusahaan swasta;

- f) Sumber dana lain yang halal dan sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B. Pelaksanaan Program Garda Ampuh

1. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi dimulai dengan *launching* program Garda Ampuh oleh Bupati Banyuwangi H. Abdullah Azwar Anas bersama Kepala Dinas Pendidikan, Dandim 0825 Banyuwangi, Kapolres Banyuwangi, dan beberapa perwakilan elemen masyarakat. Launching dilaksanakan di Taman Blambangan pada tanggal 2 Mei 2016 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2016.

2. Tahap Pencarian Data

Setelah melakukan sosialisasi maka dibentuklah Tim Pemburu Anak Putus Sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Tim tersebut terdiri dari UPTD Pendidikan setempat, PKBM, dan perwakilan desa di masing-masing kecamatan se-kabupaten Banyuwangi.

Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3

Data Rekapitulasi Peserta Program Garda Ampuh Kabupaten Banyuwangi

NO	KECAMATAN		FORMAL (SD,SMP, SMA)	NON FORMAL	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN	Bangorejo.	45	214	259
2	KECAMATAN	Banyuwangi.	24		24
3	KECAMATAN	Cluring.	37	60	97
4	KECAMATAN	Gambiran.	270		270
5	KECAMATAN	Genteng.	77		77
6	KECAMATAN	Giri.	26	251	277
7	KECAMATAN	Glagah.	2	55	57
8	KECAMATAN	Glenmore.	16	103	119
9	KECAMATAN	Kabat.	289	37	326
10	KECAMATAN	Kalibaru.	108	257	365
11	KECAMATAN	Kalipuro.	154	514	668
12	KECAMATAN	Licin.	22		22
13	KECAMATAN	Muncar.	11	256	267

NO	KECAMATAN		FORMAL (SD,SMP, SMA)	NON FORMAL	TOTAL
14	KECAMATAN	Pesanggaran	69	472	541
15	KECAMATAN	Purwoharjo.	6	92	98
16	KECAMATAN	Rogojampi.	39	53	92
17	KECAMATAN	Sempu.	55	360	415
18	KECAMATAN	Siliragung.	4		4
19	KECAMATAN	Singojuruh.	52	50	102
20	KECAMATAN	Songgon.	22	120	142
21	KECAMATAN	Srono.	10		10
22	KECAMATAN	Tegaldimo.	37	195	232
23	KECAMATAN	Tegalsari.	1	467	468
24	KECAMATAN	Wongsorejo.	103	208	311
TOTAL			1479	3764	5243

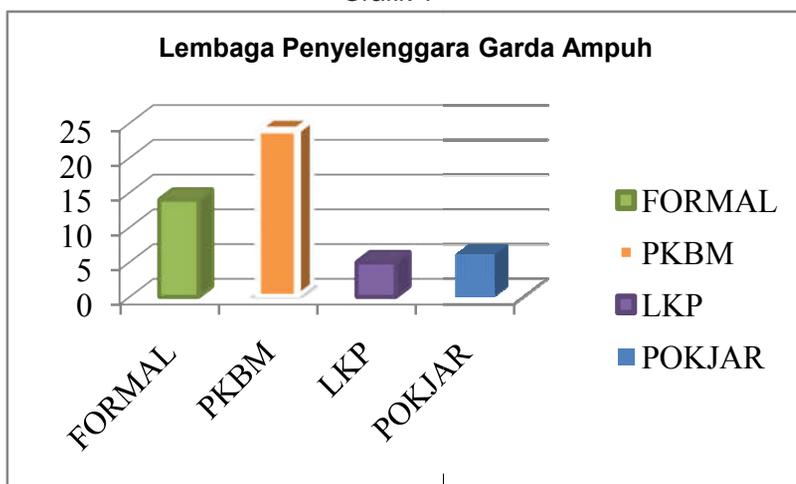
(Dinas Pendidikan:2017)

3. Tahap Pembelajaran

a) Lembaga Penyelenggara

Setelah data anak muda tidak sekolah sudah didapatkan maka tahap berikutnya adalah memberikan layanan pendidikan kepada mereka sesuai dengan minatnya. Adapun lembaga yang melayani peserta didik dari Program Garda Ampuh adalah pendidikan formal (14 lembaga), PKBM (24 lembaga), LKP (5 lembaga) dan Pokjar (6 lembaga). Jika digambarkan ke dalam diagram maka hasilnya adalah sebagai berikut.

Grafik 1

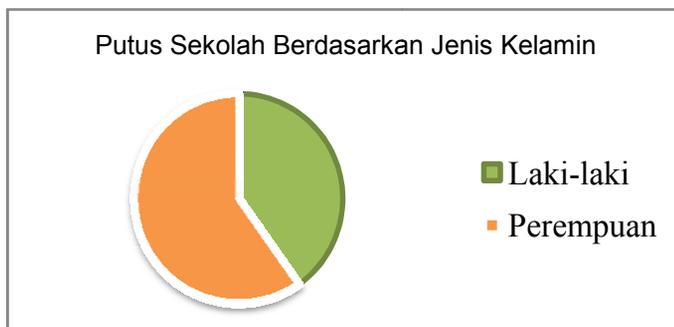


(Dinas Pendidikan:2017)

b) Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah peserta didik putus sekolah yang mengikuti program Garda Ampuh setelah didata dan direkapitulasi maka ditemukan bahwa 40.21% adalah laki-laki, dan 59.79% adalah perempuan.

Grafik 2

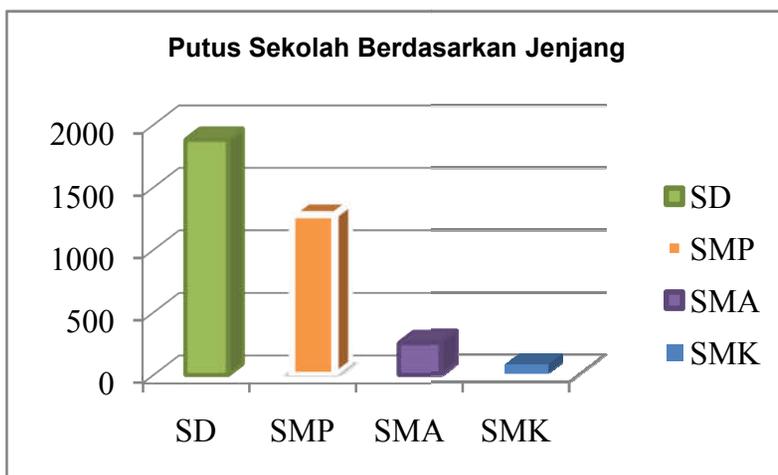


(Dinas Pendidikan:2017)

c) Putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan

Hasil rekapitulasi pendataan peserta didik program Garda Ampuh didapat hasil bahwa sebanyak 1881 orang adalah putus sekolah dasar/ sederajat. Peserta didik yang putus sekolah SMP/ sederajat sebanyak 1281 orang. Sebanyak 225 anak putus sekolah SMA/ sederajat. Sedangkan yang putus sekolah SMK adalah sebanyak 75 orang.

Grafik 3

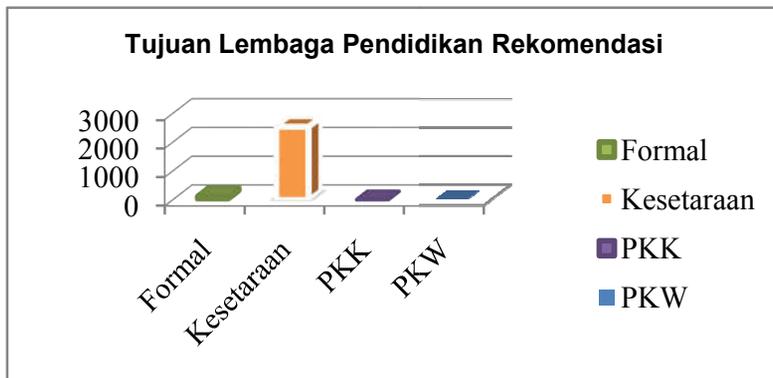


(Dinas Pendidikan:2017)

d) Tujuan lembaga pendidikan rekomendasi

Melalui pendataan yang dilakukan oleh Tim Garda Ampuh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi didapat bahwa 134 orang meneruskan ke pendidikan formal dan 2534 orang lebih memilih pendidikan kesetaraan Paket A Paket B dan Paket C.

Grafik 4

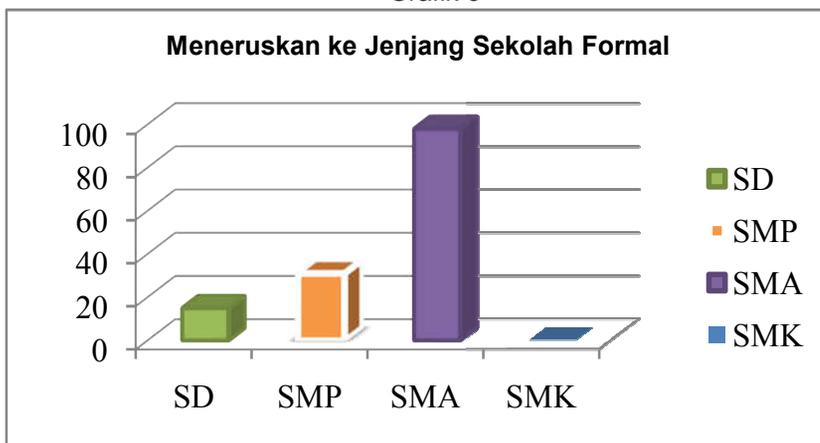


(Dinas Pendidikan:2017)

e) Meneruskan ke jenjang sekolah formal

Peserta didik Garda Ampuh yang memilih meneruskan ke pendidikan formal terbagi dalam beberapa tingkatan. Sebanyak 15 orang meneruskan kembali ke sekolah dasar/ sederajat. 31 anak juga melanjutkan ke SMP/ sederajat. Sedangkan yang meneruskan ke jenjang SMA/ sederajat adalah 98 orang.

Grafik 5

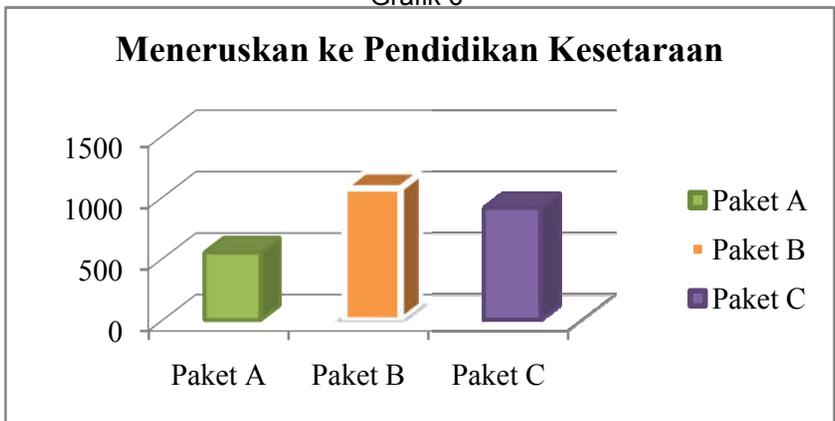


(Dinas Pendidikan:2017)

f) Meneruskan ke pendidikan kesetaraan

Peserta didik Program Garda Ampuh yang memilih meneruskan ke pendidikan nonformal/kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C terbagi dalam beberapa tingkatan. Sebanyak 551 orang meneruskan kembali ke Paket A setara SD. 1072 anak juga melanjutkan ke Paket B setara SMP. Sedangkan yang meneruskan ke jenjang Paket C setara SMA adalah 911 orang.

Grafik 6

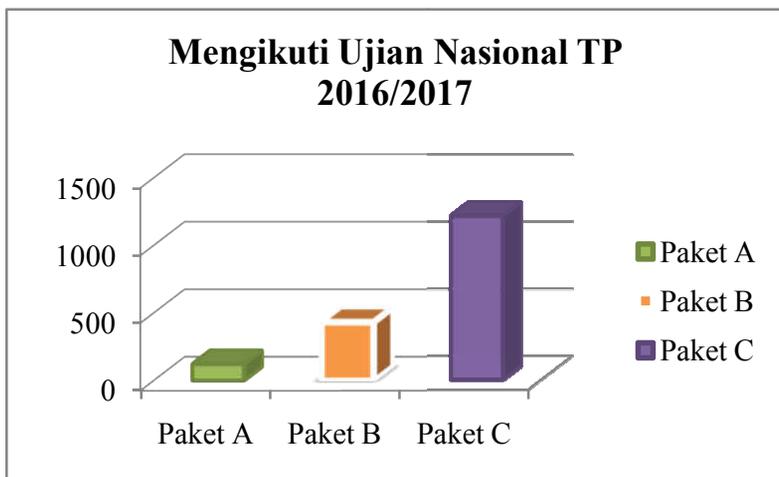


(Dinas Pendidikan:2017)

g) Output Garda Ampuh Kesetaraan

Peserta didik Garda Ampuh yang meneruskan ke pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C telah ada yang mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun pelajaran 2016/2017. Paket A sebanyak 123 warga belajar. Paket B sebanyak 432 warga belajar. Sedangkan Paket C sebanyak 1219 warga belajar.

Grafik 7



(Dinas Pendidikan:2017)

4. Tahap Evaluasi

Setelah proses pembelajaran tahun pelajaran 2016/2017 berlangsung maka Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi pelaksanaan program Garda Ampuh. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Garda Ampuh. Termasuk memetakan beberapa permasalahan yang menghambat. Berikut ini adalah bahan evaluasi program Garda Ampuh.

a) Kelebihan Program Garda Ampuh

Beberapa kelebihan program Garda Ampuh adalah:

- 1) Gerakan ini sudah relatif bisa diterima oleh masyarakat luas karena adalah program tindak lanjut program Gempita-Perpus;
- 2) Bersifat masif karena melibatkan banyak *stake holder* mulai dari Bupati, SKPD, Camat, Kepala Desa sampai RT/RW;
- 3) Masyarakat sangat antusias, dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam perburuan dan pendataan anak putus sekolah;
- 4) Tingkat kehadiran dalam setiap pembelajarannya relatif tinggi, hal ini disebabkan kreatifnya PKBM penyelenggara Paket A, Paket B, dan Paket C dalam mengelola pembelajaran, seperti menyediakan paket ketrampilan tertentu;
- 5) Peserta didik/warga belajar yang tidak mampu tidak dipungut biaya alias gratis, sedangkan yang mampu diminta bersedekah alat sekolah kepada yang tidak mampu (siswa asuh sebaya).

b) Kelemahan Program Garda Ampuh

Beberapa kelemahan program Garda Ampuh adalah:

- 1) Basis data *by name by adress* sasaran program Garda Ampuh yang digunakan masih jauh dari akurat, sehingga masih ditemukan miskomunikasi di lapangan, khususnya dengan pihak pemangku wilayah;
- 2) Belum adanya sertifikasi kompetensi bagi peserta didik pendidikan kesetaraan program Garda Ampuh, sehingga setelah lulus masih banyak yang kesulitan mencari pekerjaan;
- 3) Masih terdapat calon peserta didik program Garda Ampuh yang enggan mengikuti program ini karena berbagai alasan.

c) Hambatan dan kendala yang ditemui di lapangan

- 1) Masih banyak lembaga pendidikan nonformal khususnya LKP (lembaga kursus dan pelatihan) yang enggan menyelenggarakan program Garda Ampuh, hal ini dibuktikan dengan data Aplikasi ATS Tahun 2017;

- 2) Sulitnya medan bagi daerah terpencil di Kabupaten Banyuwangi yang membutuhkan pemikiran dan teknik khusus dalam menyelenggarakan program ini.

d) Keberlangsungan Program

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginstruksikan Pendataan ATS (Anak Tidak Sekolah) dengan batas usia 6-21 tahun. Instruksi tersebut sejalan dengan Program Garda Ampuh yang sudah lebih dulu dilakukan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Garda Ampuh

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program Garda Ampuh khususnya Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Beberapa faktornya antara lain:

a) Data anak putus sekolah

Beberapa permasalahan yang muncul dari data acuan program Garda Ampuh adalah:

- 1) Adanya perbedaan data antara BPS dan Dinas Pendidikan, hal ini karena dua intitusi tersebut mempunyai acuan tersendiri;
- 2) Data anak putus sekolah tidak ada dalam data acuan, padahal kondisinya sangat layak masuk ke dalam sasaran program;
- 3) Data anak putus sekolah tidak ditemukan.

b) Kordinasi dengan *stake holder*

Beberapa permasalahan yang muncul dari kordinasi dengan *stake holder* program Garda Ampuh adalah:

- 1) Terjadinya miskomunikasi antara UPTD Pendidikan dengan lembaga penyelenggara program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan, sehingga eksekusi program menjadi lamban;
- 2) Keterbatasan penguasaan perangkat teknologi informasi, sehingga tidak jarang komunikasi dan kordinasi dilakukan dengan manual;
- 3) Terjadinya silang pendapat terkait siapa yang harus melaksanakan program Garda Ampuh.

c) Motivasi peserta didik

Beberapa permasalahan yang muncul dari motivasi peserta didik program Garda Ampuh adalah:

- 1) Banyak peserta didik yang masih beranggapan program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan bisa cepat mendapatkan ijazah;

- 2) Masih ada peserta didik yang mempunyai argumentasi mengikuti program Garda Ampuh dengan alasan daripada meenganggur dan tidak bekerja;
 - 3) Sebagian peserta didik akan menggunakan ijazahnya kelak untuk melamar pekerjaan kasar;
 - 4) Sebagian kecil peserta didik akan menggunakan ijazahnya sebagai persyaratan kerja ke luar negeri.
- d) Sarana prasarana pembelajaran
- Beberapa permasalahan yang muncul dari sarana prasarana pembelajaran program Garda Ampuh adalah:
- 1) Adanya kewajiban UNBK (ujian nasional berbasis computer) yang menyebabkan lembaga tidak siap, karena keterbatasan sarana prasarana;
 - 2) Masih terdapatnya prasarana yang sudah tidak layak pakai karena tergolong tua;
 - 3) Banyak PKBM penyelenggara program Garda Ampuh yang memiliki ruang belajar kurang representative karena keterbatasan;
 - 4) Minimnya bahan bacaan pendukung materi pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya mengandalkan modul-modul lama.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam program Garda Ampuh khususnya Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Beberapa faktornya antara lain:

- a) Stigma bahwa PKBM lembaga tidak profesional
- Beberapa permasalahan yang muncul dari stigma bahwa PKBM dinilai sebagai lembaga tidak professional dalam program Garda Ampuh adalah:
- 1) Banyak masyarakat yang masing menganggap bahwa PKBM adalah lembaga yang bisa menerbitkan ijazah tanpa pembelajaran;
 - 2) Ada juga yang menganggap bahwa ijazah kesetaraan di PKBM dapat dibeli dan langsung jadi;
 - 3) Administrasi PKBM masih banyak yang di bawah standar pengelolaan administrasi satuan pendidikan.
- b) Motivasi orang tua/wali peserta didik
- Beberapa permasalahan yang muncul dari motivasi orang tua/wali dalam program Garda Ampuh adalah:
- 1) Banyak yang menganggap sekolah tidak penting, karena yang penting itu kerja dan mendapat penghasilan;

- 2) Kebingungan masalah pembiayaan bagi yang tidak mampu, padahal program Garda Ampuh sudah menggratiskan seluruh biaya pembelajaran;
 - 3) Masih kurang mendapat sosialisasi program Garda Ampuh.
- c) Minimnya sarana promosi dan sosialisasi program Garda Ampuh
- Beberapa permasalahan yang muncul dari minimnya sarana promosi dan sosialisasi dalam program Garda Ampuh adalah:
- 1) Banyak masyarakat yang bingung ketika mendapati anak putus sekolah, harus melapor kepada siapa;
 - 2) Perlunya promosi dalam even-even yang lebih memasyarakat, seperti pengajian umum atau pagelaran kesenian dan budaya.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Garda Ampuh

Secara garis besar pelaksanaan program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang mengikuti program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Hal ini juga didukung dengan data peserta didik program Garda Ampuh pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK). Namun demikian perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan program agar dampaknya dan nilai kemfaatannya semakin bertambah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Garda Ampuh

a) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam program Garda Ampuh khususnya Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Beberapa faktornya antara lain:

- a) Data anak putus sekolah;
- b) Koordinasi dengan *stake holder*;
- c) Partisipasi peserta didik;
- d) Sarana prasarana pembelajaran.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam program Garda Ampuh khususnya Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Beberapa faktornya antara lain:

- a) Stigma bahwa PKBM lembaga abal-abal;
- b) Motivasi orang tua peserta didik;
- c) Minimnya sarana promosi dan sosialisasi program Garda Ampuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaki Al Mubarak Evaluasi Program Garda Ampuh
- Basleman, A dan Mappa. 2011. *Teori Belajar Orang Dewasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Burhan Bungin (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cahayani, Ati.2003."Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen".Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Davis, Keith & John W. Newstrom. "*Human Behavior at Work: Organizational Behavior (Perilaku Dalam Organisasi)*". Terjemahan: Agus Dharma. Jakarta: Erlangga
- Denhardt, Robert B.1993."Theories of Public Organization".Belmont, California: Wadsworth Publishing Company
- Etzioni, Amitai. 1985. "*Organisasi-Organisasi Modern*". Terjemahan Suryatim. Jakarta, UI Press
- Gibson, James L, John M. Evancevich, & James H. Donnelly, Jr.1990. "*Organisasi, dan Manajemen*". Terjemahan Penerbit Erlangga. Jakarta, Erlangga
- Gibson, James L, John M. Evancevich, & James H. Donnelly, Jr.1997. "*Organisasi, perilaku, struktur, proses*". Jilid 1. Terjemahan Nunuk Adiarni. Jakarta, Binarupa Aksara
- Gitosudarmo, Indriyo & I Nyoman Sudita. 2000. "*Perilaku Keorganisasian*". Yogyakarta, BPFE
- Gortner, Harold F et.al.1997. "*Organization Theory, a public perspective*". Harcourt Brace & Company
- Indrawijaya, Adam I. 1989. "*Perubahan dan Pengembangan Organisasi*". Bandung, Sinar Baru
- Jafar Muhammad.2007. "*Kelakuan Organisasi*".Petaling Jaya Selangor:Leeds Publications (M) Sdn. Bhd
- Kamil, Mustofa. 2011.*Pendidikan Nonformal: Pengembangan melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*. Bandung: Alfabeta
- Latif, Abdul. 2009. *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*. Bandung: PT. Revika Aditama
- Marzuki, Saleh. 2010. *Pendidikan Nonformal: dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Zaki Al Mubarak Evaluasi Program Garda Ampuh
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Munib, Achmad. 2010. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: Unnes Press
- Sutarto, Joko. 2007. *Pendidikan Nonformal Konsep Dasar, Proses Pembelajaran, & Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UNNES-Press
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Walgito, Bimo. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI
- Yuliani, Fitri Nelpa. *Hubungan Antara Lingkungan Sosial dengan Motivasi Belajar Santri di Pesantren Madinatul Ilmi Islamiyah*. Jurnal Nasional. Spektrum PLS Vol. 1, No.2, Juli 2013. Padang: Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Padang